Vol. 4, No. 4, Desember 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Persepsi Masyarakat Desa Tumbang Habangoi Terhadap Peran LPHD Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial-ekonomi Berkelanjutan

Adis Extrada[1], Jorniko[2], Yuhana[3], Ida Bagus Suryanatha[4], Saputra Adiwijaya[5]
[1] [2] [3] [4] [5]Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : adisextrada1212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengubah cara pandang terhadap perhutanan sosial dengan menyoroti perspektif masyarakat Desa Tumbang Habangoi di Kalimantan Tengah tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai pendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan penambangan emas ilegal. Dengan metode Most Significant Change (MSC) yang inovatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi, studi ini mengumpulkan kisah transformasi dari 33 responden yang beragam, termasuk tokoh adat, perempuan, dan pemuda, yang mengungkapkan bahwa 79% di antaranya merasakan manfaat ekonomi signifikan dari KUPS rotan, sembari melestarikan hutan lebat dan nilai budaya Handep Hapakat. Temuan inovatif ini menekankan ambivalensi penting di mana LPHD berhasil dalam konservasi lingkungan dan menyediakan pendapatan stabil dari hasil hutan non-kayu, serta mengurangi pembakaran liar dan memulihkan vegetasi. Namun, tantangan muncul dari rendahnya transparansi, praktik nepotisme, dan partisipasi yang tidak merata. Dengan 59% masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, penelitian ini mencoba menggambarkan perbedaan antara penggunaan rotan berkelanjutan dan risiko dari mandulang emas.

Kata kunci: Handep Hapakat, LPHD, Persepsi Masyarakat, Tumbang Habangoi

ABSTRACT

This research transforms the perspective on social forestry by highlighting the views of the Tumbang Habangoi Village community in Central Kalimantan regarding the Village Forest Management Institution (LPHD) as a driver for sustainable social and economic welfare, despite facing the challenges of illegal gold mining. Using the innovative Most Significant Change (MSC) method through in-depth interviews, focused group discussions (FGDs), and observation, the study collected transformation stories from 33 diverse respondents, including customary leaders, women, and youth. These stories reveal that 79% of the respondents felt significant economic benefits from the rattan Business Group for Social Forestry (KUPS), while simultaneously preserving the dense forest and the Handep Hapakat cultural value. This innovative finding emphasizes a crucial ambivalence where the LPHD succeeds in environmental conservation and provides stable income from non-timber forest products (NTFPs), as well as reducing wildfires and restoring vegetation. However, challenges arise from low transparency, nepotism practices, and uneven participation. With 59% of the community depending on the forest for their livelihood, this research attempts to illustrate the difference between sustainable rattan utilization and the risks of Mandulang Emas.

Keywords: *Handep Hapakat, LPHD, Cocmmunity Perception, Tumbang Habangoi*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
07.11.2025	04.12.2025	16.12.2025	31.12.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Hutan Desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan strategi vital dalam perhutanan sosial untuk mencapai keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan komunitas (Rahman, 2024). Di Desa Tumbang Habangoi, Kalimantan Tengah, LPHD mengelola kawasan hutan dengan rotan sebagai komoditas utama untuk ekonomi, didukung oleh pendampingan dari WWF sejak 2018. Hutan ini tidak hanya menyediakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan saja, tetapi juga ladang pertanian yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat sebagai pihak yang mendapat manfaat utama. Pandangan yang positif akan mendorong partisipasi aktif, sedangkan pandangan negatif dapat menghalangi keberlanjutan program (Pratiwi, 2018). Dengan 58,17% masyarakat bergantung pada hasil hutan dan adanya konflik dengan kegiatan ilegal seperti Mandulang Emas. Mengingat ketergantungan tinggi masyarakat terhadap hasil hutan dan adanya trade-off ekonomi dengan aktivitas mandulang yang terlihat lebih menjanjikan, pemahaman tentang persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa LPHD dapat mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Tumbang Habangoi memandang kontribusi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) rotan, sosial yang mencakup partisipasi masyarakat dan nilai kultural Handep, serta aspek ekologis terkait konservasi hutan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian tantangan utama yang dihadapi LPHD dalam menciptakan persepsi positif, terutama dalam hal transparansi pengelolaan, pemerataan partisipasi masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi yang signifikan. Penelitian ini juga ingin menganalisis dampak dari persepsi yang beragam kepada keberlanjutan program Hutan Desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis pandangan masyarakat mengenai peran LPHD dalam mencapai tiga dimensi kesejahteraan, seperti ekonomi yang berkelanjutan, sosial yang inklusif, dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengungkap tantangan lembaga LPHD yang memengaruhi persepsi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah transparansi dan partisipasi yang belum merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Most Significant Change (MSC) yang merupakan suatu pendekatan evaluasi kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta memahami perubahan yang paling signifikan dari suatu program atau intervensi (Qodratulloh, 2023). MSC mengumpulkan cerita dan pandangan dari para pelaku atau penerima manfaat tentang perubahan yang mereka anggap paling berarti (Sutopo, 2022). Dalam studi yang dilakukan di Desa Tumbang Habangoi, MSC diterapkan untuk mengevaluasi dampak pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD terhadap masyarakat dan lingkungan. Proses MSC diawali dengan mengumpulkan cerita perubahan dari berbagai responden yang mewakili kelompok masyarakat yang berbeda, seperti anggota LPHD, tokoh adat, perempuan, dan pemuda. Cerita-cerita ini dianalisis secara mendalam melalui wawancara, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), dan observasi lapangan.

Penulis kemudian memilih cerita-cerita yang menunjukkan "perubahan paling signifikan" berdasarkan kriteria yang telah disepakati, yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis MSC dilakukan dengan mendokumentasikan dan mengelompokkan perubahan-perubahan penting yang ditemukan, kemudian memetakan pola serta implikasinya terhadap keberlanjutan program. Pendekatan ini memungkinkan untuk menangkap dampak yang bersifat subjektif dan kontekstual, yang sulit diukur dengan metode kuantitatif biasa (Pratiwi, 2018). Setelah itu, data kualitatif dibuat menjadi data kuanti sesuai dengan kebutuhan analisis untuk mengukur perubahan mana yang paling dirasakan oleh masyarakat. Hal ini membantu penulis dalam memahami sosial-ekonomi masyarakat desa Tumbang Habangoi secara mendalam sekaligus mengidentifikasi tantangan dan program perbaikan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tumbang Habangoi, yang berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia, terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya, terutama hutan lebat yang sangat vital bagi kehidupan penduduk setempat. Dengan populasi sekitar 300 kepala keluarga yang terbagi dalam tiga rukun tetangga (RT), rata-rata mata pencaharian masyarakat desa ini adalah pertanian, pengelolaan hasil hutan, dan sebagian kecil terlibat dalam penambangan emas tradisional, 59% masyarakat bergantung pada hutan desa. Wilayah desa ini dikelilingi oleh hutan yang terjaga dan merupakan bagian dari kawasan konservasi yang dikelola melalui skema perhutanan sosial, khususnya Hutan Desa. Pengelolaan hutan desa dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), yang berfungsi untuk mengoordinasikan aktivitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai program, seperti pengelolaan rotan, penanaman pohon, dan pengembangan ekowisata.

Hutan Desa adalah program perhutanan sosial yang memberikan hak kepada warga desa untuk secara berkelanjutan mengelola hutan di wilayah mereka (Fitriana, 2023). Tujuannya adalah untuk melestarikan ekosistem hutan dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Rahman, 2024). Dengan pengelolaan yang melibatkan partisipasi, Hutan Desa memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan seperti rotan dan produk non-kayu lainnya tanpa merugikan lingkungan. Di Desa Tumbang Habangoi, program ini telah berkontribusi dalam menjaga kepadatan vegetasi hutan dan melindungi keberadaan satwa liar, serta menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan.

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Tumbang Habangoi merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mengelola dan memantau pengelolaan Hutan Desa. LPHD memiliki tanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan seperti pembibitan dan penanaman pohon, pengelolaan rotan sebagai komoditas utama, serta pengembangan ekowisata yang melibatkan partisipasi aktif dari warga. Meskipun LPHD memberikan dampak positif terhadap pelestarian hutan dan menciptakan peluang ekonomi, partisipasi masyarakat belum merata dan sering terhambat oleh sistem pengelolaan yang dianggap eksklusif. Selain itu, LPHD berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, mengelola kepentingan ekonomi dan sosial secara berkolaborasi (Isnaini, 2024).

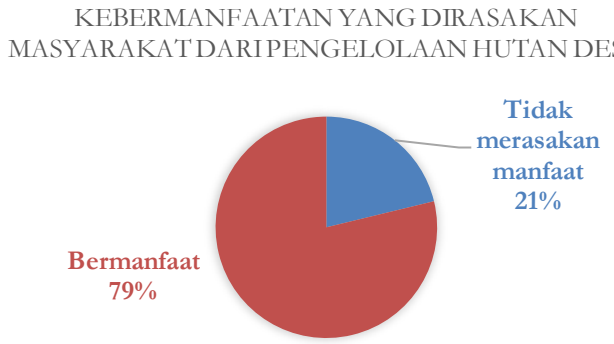
World Wide Fund for Nature (WWF) Kalimantan Tengah berperan sebagai pendamping eksternal untuk LPHD dan masyarakat Desa Tumbang Habangoi dalam pengelolaan Hutan Desa. Mereka memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan bimbingan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan LPHD serta memperkuat kesadaran masyarakat. Kerja sama ini sangat penting untuk menjamin pengelolaan hutan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. WWF juga berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku bisnis, serta mendorong penerapan nilai-nilai budaya dan sosial seperti budaya adat Dayak dalam pertanian yaitu *Handep* untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan WWF dianggap strategis dalam menghadapi tantangan dari aktivitas ekonomi yang cepat yang dapat merusak lingkungan.

Nilai *Handep Hapakat* dinilai "kuat" oleh masyarakat bahkan sebelum terbentuknya LPHD, dan pengelolaan hutan oleh LPHD tidak mengubah ikatan sosial tersebut. Sebaliknya, *Handep* menjadi aset sosial penting yang memperkuat legitimasi LPHD di mata masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat *Handep* melalui pendidikan bagi generasi muda, memperkuat peran tokoh adat dalam menjaga kesepakatan, serta menyusun peraturan desa yang mencerminkan nilai-nilai budaya ini agar tetap relevan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Rahman, 2024). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan munculnya berbagai tantangan yang kompleks. Masyarakat Desa Tumbang Habangoi menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga beberapa dari mereka beralih ke sumber pendapatan alternatif yang lebih cepat dan berisiko, seperti penambangan emas ilegal (yang dikenal sebagai Mandulang Emas). Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga memicu konflik sosial dan risiko kesehatan (Fardila, 2025)(Ulzikri, 2020). Meskipun LPHD dan mitra mereka berusaha untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, ketegangan sering muncul antara nilai-nilai konservasi budaya seperti Handep (gotong royong) dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak.

Masalah ini mengindikasikan perlunya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hutan Desa di Desa Tumbang Habangoi masih menyimpan banyak sumber daya alam, seperti rotan dan tanaman hasil hutan non-kayu, yang memberikan kontribusi

signifikan bagi pendapatan keluarga yang terlibat langsung dalam pengelolaan LPHD. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan munculnya berbagai tantangan yang kompleks. Masyarakat Desa Tumbang Habangoi menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga beberapa dari mereka beralih ke sumber pendapatan alternatif yang lebih cepat dan berisiko, seperti penambangan emas ilegal yang lebih di kenal dengan sebutan mendulang emas. Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga memicu konflik sosial dan risiko kesehatan (Nugraha, 2025). Meskipun LPHD dan mitra mereka berusaha untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, ketegangan sering muncul antara nilai-nilai konservasi budaya seperti *Handep* dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak. Masalah ini mengindikasikan perlunya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Niwele, 2021). Hutan Desa di Desa Tumbang Habangoi masih menyimpan banyak sumber daya alam, seperti rotan dan tanaman hasil hutan non-kayu, yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan keluarga yang terlibat langsung dalam pengelolaan LPHD.

Walaupun demikian, keterlibatan masyarakat belum merata dan terkadang terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat, sehingga penting untuk meningkatkan fungsi kelembagaan, transparansi, dan partisipasi seluruh anggota lembaga. Dengan memahami kompleksitas sosial-ekonomi dan dampak ekologis di daerah ini, penelitian ini bertujuan untuk menilai keberhasilan dan tantangan Hutan Desa sebagai skema perhutanan sosial, yang akan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk konservasi lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Tumbang Habangoi.



Gambar 1. Diagram Lingkaran (Kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat dari pengelolaan hutan desa)

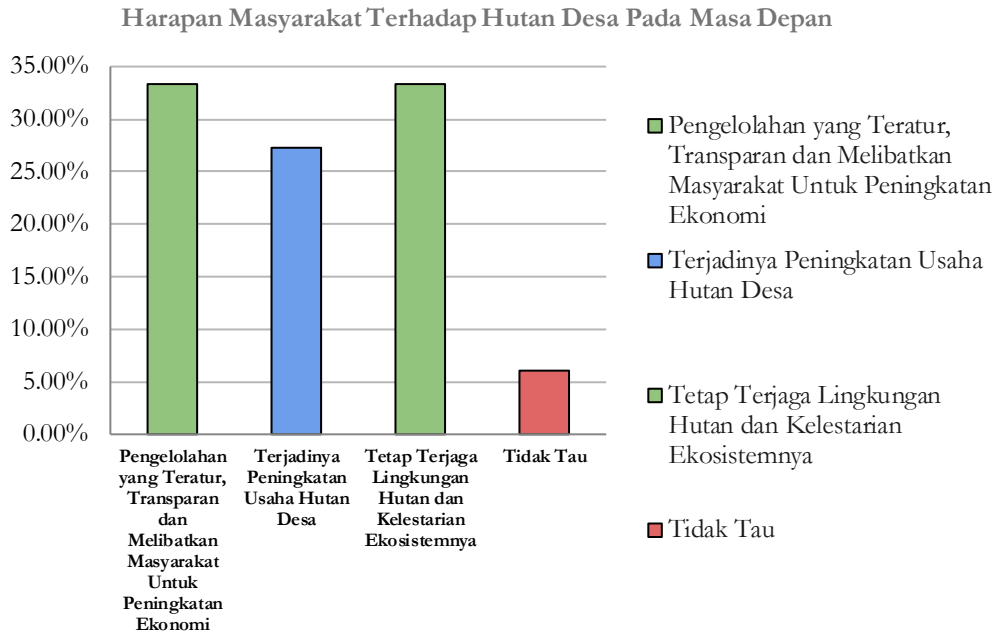
Sumber: Data diolah penulis (2025)

Hasil dari temuan menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai dampak keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Sebagian besar responden, sebanyak 21%, mengaku tidak merasakan perubahan signifikan karena mereka merasa tidak perlu atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan LPHD. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam partisipasi masyarakat secara merata, sehingga sebagian warga belum merasakan keuntungan yang nyata dari program pengelolaan hutan desa.

Di sisi lain, sekitar 79% dari responden merasakan keuntungan ekonomi langsung akibat keberadaan LPHD. Mereka menyadari bahwa pengelolaan Hutan Desa memberikan tambahan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar desa, seperti melalui usaha pengelolaan rotan, kegiatan penanaman pohon, dan pengembangan ekowisata. Manfaat ekonomi ini dirasakan terutama oleh warga yang aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan yang dikoordinasikan oleh LPHD. Keberhasilan ini menunjukkan betapa LPHD berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, meskipun perluasan partisipasi masih diperlukan.

Terkait keinginan masyarakat untuk masa depan, terdapat dua harapan yang seimbang. Sekitar 34% dari mereka menginginkan tata kelola LPHD yang lebih teratur, transparan, dan melibatkan lebih banyak orang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Harapan ini mencerminkan keinginan warga akan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya hutan desa. Di sisi lain, 33% lainnya berharap agar lingkungan hutan dan ekosistemnya tetap terjaga dengan baik. Mereka

menyadari pentingnya keberlanjutan ekologis sebagai dasar jangka panjang untuk kehidupan dan perekonomian desa. Harapan ini menekankan kesadaran masyarakat akan perlunya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi agar hutan tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.



Gambar 2. Diagram batang (harapan masyarakat terhadap hutan desa pada masa depan)

sumber: data diolah penulis (2025)

Terkait keinginan masyarakat untuk masa depan, terdapat dua harapan yang seimbang. Sekitar 34% dari mereka menginginkan tata kelola LPHD yang lebih teratur, transparan, dan melibatkan lebih banyak orang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Harapan ini mencerminkan keinginan warga akan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya hutan desa. Di sisi lain, 33% lainnya berharap agar lingkungan hutan dan ekosistemnya tetap terjaga dengan baik. Mereka menyadari pentingnya keberlanjutan ekologis sebagai dasar jangka panjang untuk kehidupan dan perekonomian desa. Harapan ini menekankan kesadaran masyarakat akan perlunya keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi agar hutan tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Tumbang Habangoi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama LPHD adalah mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), terutama dalam pengelolaan dan panen rotan yang merupakan komoditas utama di wilayah tersebut. Melalui KUPS, LPHD tidak hanya menciptakan peluang usaha baru, tetapi juga memberikan akses pasar yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak penduduk, terutama yang terlibat dalam pengelolaan rotan, melaporkan peningkatan pendapatan yang membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka dan juga meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi lokal.

Seiring dengan peningkatan manfaat ekonomi dari kegiatan KUPS rotan, masyarakat Desa Tumbang Habangoi menghadapi dilema ekonomi yang cukup kompleks. Penelitian menemukan adanya *trade-off* atau pertukaran antara penghasilan berkelanjutan yang diperoleh melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan sektor pertanian, dengan penghasilan cepat dari aktivitas penambangan emas ilegal yang dikenal dengan Mandulang Emas. Aktivitas Mandulang Emas menawarkan keuntungan finansial yang instan, sehingga menjadi pilihan menarik bagi sebagian masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pekerjaan (Anggara, 2025). Namun, meskipun penghasilannya cepat, sebagian besar responden menyatakan bahwa aktivitas ini tidak memberikan dampak perubahan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi komunitas secara keseluruhan.

Selain dampak ekonomi yang terbatas, kegiatan Mandulang Emas juga membawa risiko ekologis dan sosial yang serius. Kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai akibat penggunaan alat sedot emas modern dan limbah merkuri, dapat menurunkan kualitas air dan merusak kehidupan biota Sungai (Aqilla, 2023). Selain itu, kegiatan ini dapat memicu konflik sosial serta mengganggu ketertiban dan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan jangka panjang (Fardila, 2025). Meskipun dua Sungai yang membantang di Desa Tumbang Habangoi tidak memiliki potensi emas, namun jika suatu saat ditemukan celah emas maka habis lah keberlanjutan hutan desa, akan ada pengerukan besar-besaran yang dapat merugikan hutan dan masyarakat. Situasi ini mendorong LPHD untuk lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong alternatif ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi LPHD adalah bagaimana menghasilkan nilai ekonomi yang nyata dan berkelanjutan dari Hutan Desa, sehingga masyarakat dapat berpaling dari aktivitas berisiko seperti Mandulang Emas. LPHD perlu memperkuat kapasitas organisasi dan operasionalnya, serta mengembangkan diversifikasi usaha KUPS agar tidak hanya bergantung pada rotan. Di samping itu, perbaikan akses pasar dan peningkatan kualitas produk hasil hutan sangat penting agar produk berbasis hutan dapat bersaing dan memberikan pemasukan yang stabil serta memadai bagi pengelola dan masyarakat secara umum.

Keberhasilan LPHD dalam mempromosikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi pendukung seperti WWF. Untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, penting untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dalam pengelolaan, serta memberikan edukasi tentang nilai konservasi dan ekonomi berkelanjutan. Dengan cara ini, LPHD dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif sembari menjaga kelestarian lingkungan di Desa Tumbang Habangoi.

Namun, data penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam kegiatan LPHD tidak merata. Banyak warga, terutama yang tidak memiliki lahan di area hutan desa, merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun program LPHD. Selain itu, terdapat persepsi bahwa pengurus LPHD lebih memilih anggota dari kelompok tertentu, yang menyebabkan ketidakadilan dan eksklusi bagi sebagian warga, khususnya di RT 01 yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

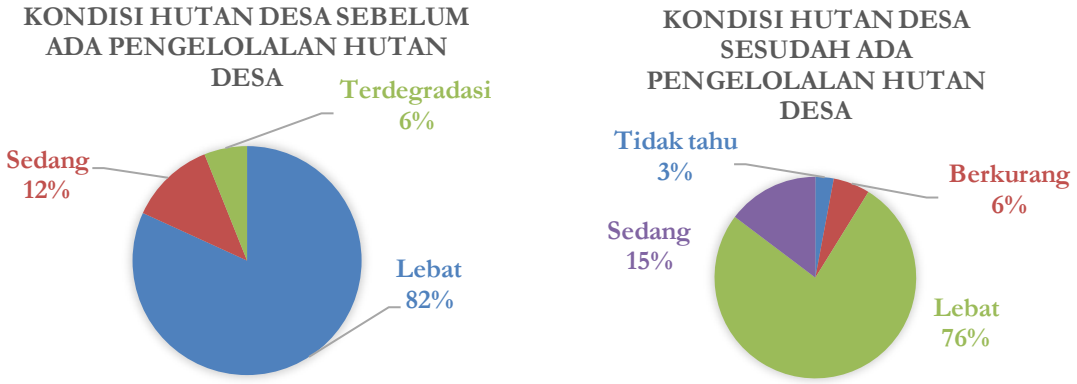
Meskipun demikian, kelompok perempuan dan pemuda berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang diorganisir oleh LPHD. Perempuan memiliki peran utama dalam kegiatan anyaman rotan yang dilakukan melalui sistem gotong royong, yang menunjukkan pentingnya peran gender dalam pengembangan ekonomi desa. Di sisi lain, pemuda terlibat dalam restorasi hutan dan penanaman pohon, yang juga berfungsi sebagai pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Partisipasi kelompok-kelompok rentan ini memberikan dampak positif dalam menjaga kelestarian hutan dan sekaligus menciptakan peluang pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusif.

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam kelembagaan LPHD. Beberapa masayarakat menganggap LPHD tidak cukup terbuka dalam hal distribusi hasil dan pengelolaan keuangan, yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan. Penyampaian informasi masih sangat terbatas, sehingga banyak warga tidak sepenuhnya memahami mekanisme dan peran LPHD. Ditambah lagi, adanya sistem pengurus yang terkesan nepotistik dan memunculkan kepentingan kelompok memperburuk situasi, di mana pengurus lama dan kelompok tertentu mendominasi dalam pengambilan keputusan serta distribusi keuntungan rotan dan hasil usaha lainnya.

Sebelum terbentuknya LPHD, masyarakat Desa Tumbang Habangoi telah menjalin hubungan sosial yang kuat berlandaskan semangat *Handep Hapakat*, yang mencakup tradisi gotong royong dan kebersamaan antarwarga. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan LPHD tidak banyak mempengaruhi hubungan sosial tersebut, mayoritas responden menyatakan bahwa hubungan komunitas tetap kuat dan harmonis. Namun, ketidakmerataan partisipasi serta masalah kelembagaan dapat memicu potensi konflik kecil yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak solidaritas sosial yang telah terjalin (Nuraeny, 2023).

Di sisi lain, LPHD di Desa Tumbang Habangoi telah berhasil mempertahankan hutan dalam kondisi "Lebat" sebelum dan sesudah dimulainya pengelolaan formal pada tahun 2018. Menurut data dari 33 responden, sebagian besar mengindikasikan bahwa vegetasi hutan masih sangat padat, dengan kehadiran pohon besar seperti ulin, meranti, dan banuas, serta rotan yang melimpah. Keberhasilan ini terlihat dari

perbaikan kualitas hutan setelah LPHD mulai aktif, di mana kerapatan vegetasi meningkat dan keberadaan satwa liar, seperti babi hutan, musang, dan kancil, tetap terlindungi. Kondisi ekologis yang positif ini merupakan aset penting bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari mereka (Aqilla, 2024).



Gambar 3. Diagram Lingkaran (perbandingan kondisi hutan desa sebelum dan sesudah adanya pengelolaan hutan desa)

sumber: data diolah penulis (2025)

Sebagian besar responden (sekitar 70%) berpendapat bahwa LPHD berhasil dalam menjaga kelestarian dan kualitas hutan desa melalui berbagai upaya pencegahan. Kebijakan utama yang diterapkan LPHD adalah larangan membakar hutan dan pembatasan penebangan liar, yang membantu mengurangi praktik berladang berpindah yang merusak ekosistem. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi pohon induk, tetapi juga mendukung proses regenerasi alami hutan, sehingga Hutan Desa Habangoi tetap berfungsi sebagai "hutan lindung" yang produktif bagi masyarakat.

Pengurangan praktik ilegal merupakan salah satu pencapaian terpenting LPHD. Para responden mengakui bahwa sebelum kehadiran LPHD, praktik pembalakan ilegal dan pembakaran lahan untuk pertanian sering terjadi. Saat ini, LPHD secara aktif melarang pembakaran hutan nasional dan memberlakukan aturan tebang pilih yang ketat. Meskipun ada tantangan dari aktivitas penambangan emas di sungai sekitarnya, LPHD berhasil mengurangi aktivitas ilegal di kawasan hutan inti. Hal ini menggarisbawahi peranan LPHD sebagai "penjaga hutan" yang efektif dalam melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang berlebihan.

LPHD secara aktif mendukung konservasi dengan melaksanakan program penanaman bibit secara luas bersama masyarakat. Berbagai jenis bibit pohon dan buah seperti jengkol, petai, durian, lengkeng, kopi, kakao, meranti, dan benuas telah ditanam di area hutan desa. Program ini tidak hanya melibatkan anggota LPHD, tetapi juga masyarakat umum melalui sistem gotong royong (handep). Tujuan dari penanaman ini adalah untuk mengganti pohon yang ditebang secara selektif dan mengembangkan agrowisata di masa depan. Selain itu, LPHD juga mengelola depot air bersih yang bersumber dari mata air hutan, menjaga kualitas air sungai dan menciptakan potensi ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Tumbang Habangoi terhadap peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bersifat *ambivalen*. Di satu sisi, LPHD diakui oleh masyarakat berhasil memberikan dampak positif dalam ekonomi berkelanjutan mereka, terutama melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) rotan, yang meningkatkan pendapatan warga, serta mendukung keberlanjutan ekologis dengan menjaga kelestarian hutan seperti menjual rotan dan menganyam rotan serta mengurangi praktik ilegal seperti pembakaran lahan. Namun, di sisi lain, LPHD menghadapi tantangan yang nyata dalam hal sosial dan tata kelola, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat yang merata dan transparansi yang masih rendah dalam pengelolaan, sehingga menciptakan rasa terpinggirkan di kalangan warga RT 01 dan kelompok yang tidak memiliki akses ke hutan. LPHD dianggap nepotisme

dalam menjalankan lembaga serta pilih-pilih dalam menentuka anggota. Hal ini memicu persepsi butuk dari masyarakat dan dapat berpengaruh besar dalam tujuan LPHD dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan program LPHD sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga ini untuk berdiri sendiri secara finansial dan menciptakan nilai ekonomi yang bersaing. Pendampingan WWF tentu tidak akan berlasung selamanya, LPHD diharapkan mampu untuk berdiri sendiri, mengelola hutan desa dengan baik sesuai dengan tujuan LPHD. Karena jika LPHD terus bergantung kepada pendampingan WWF justru akan menjadi permasalahan baru di masyarakat, di mana masyarakat kurang percaya terhadap WWF atau masyarakat merasa terancam dengan adanya WWF. Mereka takut akan peralihan penguasaan lahan pribadi mereka, mereka takut tidak dapat mengelola di lahan mereka sendiri, dan anak cucu mereka tidak bisa mengelola lahan mereka. Saat ini, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara pendapatan stabil dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan dan pendapatan cepat namun berisiko tinggi dari Mandulang Emas. LPHD perlu menyediakan alternatif ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih menguntungkan agar warga mau dengan sukarela meninggalkan praktik ilegal yang merusak lingkungan sungai dan ekosistem hutan.

REFERENSI

Anggara, K. (2025). Tambang Emas Ilegal Banyumas dalam konteks Ketahanan Nasional dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1-10.

Aqilla, A. R. (2023). Analisis Dampak Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan di Sumatera Barat: Systematik Review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 169-174.

Aqilla, A. R. (2024). Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 437-440.

Fardila, M. (2025). Analisis Hukum Lingkungan Penambangan Emas Liar Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Sekitar Sungai Di Silungkang, Kota Sawahlunto. *Journal of Innovative and Creativity*, 30689-30695.

Fitriana, Z. M. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui BUMDes sebagai Instrumen Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Media Luris*, 323-342.

Isnaini, C. H. (2024). Partisipasi Anggota LPHD Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Sebubus di Desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 560-569.

Niwele, A. V. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 54-64.

Nugraha, M. R. (2025). Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi . *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5302-5318.

Nuraeny, T. D. (2023). Resolusi konflik tenurial di kawasan Hutan Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Ulin Jurnal Hutan Tropis*, 183-191.

Pratiwi, R. (2018). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kesepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Nusa Sylva*, 31-37.

Qodratulloh, W. (2023). Pengadaptasian "The Most Significant Change" sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 149-156.

Rahman, F. (2024). Menelisik Hutan Desa (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 393-409.

Sutopo, D. S. (2022). Horison Kemajuan Desa Menyelami Peranan Pemimpin dan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang) . *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 147-161.

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994